

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik di Indonesia sangat beragam mulai dari konflik etnis, suku, agama maupun konflik sosial budaya. Konflik tersebut merupakan konsekuensi dari keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi banyak sekali konflik, baik yang berskala lokal hingga berskala daerah bahkan hingga berskala nasional. Keberagaman konflik di Indonesia tidak hanya diwarnai oleh konflik horisontal namun juga diwarnai oleh konflik vertikal. Di Indonesia, beberapa contoh konflik tersebut diantaranya adalah konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada 1999-2004, konflik Ambon dan Poso pada 1999 yang memiliki motif yang sama yaitu konflik agama, kerusuhan Jakarta Lautan Api 1998 berbau rasial, kasus di Mesuji pada akhir 2011 yang merupakan konflik horisontal dan bahkan konflik ideologi seperti G30S/PKI.¹

Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kehidupan berbangsa tidak lepas dari adanya konflik, baik konflik antar individu maupun konflik antar kelompok dan golongan. Berdasarkan keragaman konflik itu pemerintah diharapkan memetakan potensi-potensi konflik yang ada di Daerah-daerah sehingga dapat di hindari sedini mungkin ataupun dapat diselesaikan sesegera mungkin.

¹ Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012, *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, hlm. 1

Salah satu potensi konflik terbesar berada di Provinsi Lampung, Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra persisnya terletak di ujung selatan Pulau Sumatra berbatasan dengan Pulau Jawa. Provinsi Lampung sendiri merupakan pintu masuk Pulau Sumatera jalur darat dari Pulau Jawa. Secara administratif Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan, Bengkulu dan Banten.

Dilihat dari letak geografisnya, Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Pulau Jawa memberikan akses yang cukup mudah bagi transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk menetap di Provinsi Lampung. Menurut data sejarah, gelombang transmigrasi pertama terjadi pada November 1905 di era Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu transmigrasi pertama datang dari karesidenan Kedu.²

Transmigrasi di Provinsi Lampung tersebut menyebabkan akulturasi budaya serta keberagaman yang cukup tinggi. Beberapa suku yang mendiami Provinsi diantaranya adalah Jawa 4.113.731 jiwa(61,88%); Lampung 792.312 jiwa (11,92%); Sunda, termasuk Banten 749.566 jiwa (11,27%); Semendo dan Palembang 36.292 jiwa (3,55%); Suku bangsa lain (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, dll) 754.989 jiwa(11,35%). Data diambil dari tahun 2000 sebab setelahnya BPS tak lagi mengelompokkan penduduk berdasarkan suku.³

²Okezone, Awal Mula Kedatangan Transmigran Jawa Ke Lampung, <http://m.okezone.com/read/2013/11/27/345/903438/awal-mula-kedatangan-transmigran-jawa-ke-lampung>, Di akses tanggal 12 oktober pukul 19.00 WIB

³ BPS 2010

Sebagian besar penduduk Provinsi Lampung beragama Islam (95,48%) dan beberapa agama lain seperti Kristiani (1,51%), Katolik (1,20%) Hindu (1,49%), Budha (0,32%) dan Konghucu (0,1%) . Warga keturunan Suku Bali mayoritas beragama Hindu sedangkan keturunan Suku Lampung sendiri mayoritas beragama Islam.⁴

Suku Lampung merupakan salah satu suku asli yang mendiami pulau Sumatera, maka dilihat dari faktor geografis dan budaya Suku Lampung cenderung memiliki karakter yang keras, berpendirian yang kuat dan menjunjung tinggi harga diri seperti saudara-saudaranya suku yang ada disumatera yang memiliki karakter keras. Berbeda dengan Suku Bali yang cenderung cenderung lembut dan halus.

Dengan adanya keberagaman suku dan agama tersebut maka di Provinsi Lampung memiliki potensi konflik yang tinggi. Konflik yang terjadi Provinsi Lampung cukup beragam, mulai dari konflik sosial hingga konflik suku. Beberapa kasus diantaranya adalah bentrokan antara Warga Tanjung Rejo dan Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah, Konflik di Mesuji serta Konflik di Balinuraga Lampung Selatan.⁵

Konflik di Desa Balinuraga yang terjadi pada bulan Oktober ini kedua belah pihak tidak bisa menemukan titik temu sehingga gesekan semakin memanas dan kerusuhan tidak bisa dielakan lagi.

⁴ Sensus Penduduk 2010

⁵ Hukum Online, Pemerintah Dituntut Serius Selesaikan Konflik Di Lampung
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55e6877686d20/pemerintah-dituntut-serius-selesaikan-konflik-di-lampung> Diakses tanggal 14 Okt. 15, Pukul 02.09 WIB

Pasca kejadian sekitar 1500 personil gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan kawasan konflik, penerjungan aparat tersebut dinilai lamban karena konflik telah menelan korban jiwa. Aparat seharusnya menerjunkan personil ketika warga mulai memanas guna meredam konflik dan meminimalisir korban jiwa. Jumlah korban jiwa adalah 14 orang yang terdiri dari 10 orang warga kampung Balinuraga dan 4 orang warga kampung Agom.⁶

Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah penelitian adalah salah satu kabupaten yang dihuni Suku Lampung dan suku pendatang, dalam falsafah orang Lampung yaitu Piil-Pusanggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri), Juluk-Adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya), Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu), Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis), Sakai-Sambaian (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya) seharusnya apabila falsafah tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan sangat menghindari konflik.⁷ Suku Lampung hakikatnya sangat terbuka dengan pendatang namun sangat menjunjung tinggi harga diri sehingga apabila harga dirinya di lecehkan tidak segan untuk membalas.

⁶Kompas, Korban Tewas Di Lampung Selatan Jadi 14 Orang, <http://regional.kompas.com/read/2012/10/30/15124247/Korban.Tewas.di.Lampung.Selatan.Jadi.14.Orang> Diakses 19 Oktober 2015, Pukul 11.30 WIB

⁷ Imran, Amrin, 2001, *Radin Inten II: pahlawan nasional dari Lampung*, Jakarta: Sentra Kreasi, hlm. 13

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan suatu konflik di dalam masyarakat serta upaya masyarakat untuk menghindari konflik dan upaya-upaya untuk menemukan solusi disetiap konflik yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Kabupaten Lampung Selatan, penanganan konflik oleh pemerintah sangat lamban dan cenderung memakan waktu yang lama. Beberapa konflik karena lambannya penanganan hingga mengganggu stabilitas nasional misalnya konflik Sampit dan Poso. Diharapkan, pemerintah tidak hanya menyelesaikan namun juga mampu mencegah sedini mungkin potensi-potensi konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat meminimalisir skala konflik. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah harus lebih terdepan dan responsif dalam menanggapi isu-isu yang beredar dimasyarakat sehingga pencegahan oleh pemerintah dalam hal ini aparaturnegara dapat dilakukan sedini mungkin.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar suku di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam upaya menangani konflik antar suku di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik antar suku di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui proses perdamaian konflik yang telah dilakukan baik oleh tokoh adat maupun pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk menghindari konflik di daerah-daerah rawan konflik diluar Pulau Jawa.
2. Penelitian Ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji mengenai konflik antar suku di Indonesia sehingga diharapkan kelak dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan atau model dalam menangani konflik suku di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menangani konflik-konflik kesukuan yang ada di Indonesia sehingga kedepannya pemerintah akan lebih tanggap terhadap penanganan konflik.

E. Kerangka Teori

Didalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka yang dilakukan meliputi teks, jurnal, tesis dan hasil penelitian lain yang pernah dilakukan. Kajian pustaka ini menampilkan penjelasan mengenai kata kunci penelitian dalam hal ini adalah konflik, jenis-jenis konflik, dan rekonsiliasi.

1. Definisi Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik merupakan interaksi antar dua belah pihak bisa sebagai individu maupun kelompok, salah satu pihak atak keduanya saling menyingkirkan dan membuat yang lain tidak berdaya.⁸

Konflik sendiri merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan setiap golongan terhadap golongan lain sehingga menimbulkan perbedaan pandangan, Lebih lanjut pakar memberikan pendapat dibawah ini

Menurut Webster yang dikutip oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Teori Konflik Sosial, istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata ini kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain,

⁸ Rusdiana H. A., 2015, *Manajemen Konflik*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 68

istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik itu sendiri.⁹

2. Teori

a. Teori Konflik

Menurut Dahendorf, masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang berdasarkan pada kekuasaan atau wewenang atau wewenang. Kekuasaan adalah dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan, sedangkan wewenang adalah dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Dahendorf menamakan kondisi itu sebagai “*imperated coordinated associations*” (asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa). Kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak berbeda dalam asosiasi-asosiasi tersebut akan menimbulkan polarisasi dan konflik antara kedua kelompok.

Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik terbuka lebih umum terjadi pada hubungan-hubungan sosial daripada hubungan hubungan sosial yang personal dan intim. Hubungan sosial parsial misalnya hubungan antara partner bisnis, sedangkan hubungan sosial yang personal misalnya hubungan antaranggota keluarga, antaranggota suku, dan antarwarga negara. Meskipun demikian, perbedaan atau perselisihan dalam hubungan sosial yang intim juga merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak dan lebih menghancurkan daripada konflik yang terjadi dalam hubungan sosial parsial. Coser

⁹ Pruitt, Dean G. & Rubin, Jeffrey Z., 1986, *Teori Konflik Sosial*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 9

menyatakan bahwa dalam hubungan yang intim, umumnya orang berusaha menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik. Namun, hal itu akan mengakibatkan akumulasi permusuhan yang sewaktu-waktu bisa meledak.¹⁰

b. Landasan Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan Kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf B salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat.

¹⁰ Maryati & Suryawati, 2007, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 55

3. Jenis Konflik

Menurut Handoko yang dikutip oleh A. Rusdiana dalam Manajemen Konflik, Konflik memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Konflik dalam diri individu, konflik dalam diri organisasi, konflik antar individu dengan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antarorganisasi. Keberagaman peristiwa dari wujud konflik sosial tersebut sesungguhnya dapat diklasifikasikan kedalam enam kelompok konflik sosial, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Konflik Pribadi

Konflik pribadi merupakan pertentangan antara 2 individu yang bertikai. Pertikaian ini misalnya pertikaian antara suami dan istri.

b. Konflik Kelompok

Konflik kelompok merupakan konflik yang melibatkan 2 kelompok atau lebih didalam masyarakat.

c. Konflik Antarkelas Sosial

Konflik antarkelas ini terjadi pada suatu kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda dan biasanya diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan ataupun perbedaan pandangan.

d. Konflik Rasial

¹¹ Rusdiana, Op.Cit., 141

Ras merupakan sesuatu yang dapat dilihat perbedaannya secara visual yang melekat pada setiap kelompok. Perbedaan-perbedaan tersebut misalnya adalah perbedaan warna kulit, perbedaan warna dan jenis rambut ataupun perbedaan warna bola mata. Konflik Rasial biasanya terjadi karena perbedaan pandangan yang menganggap suatu ras lebih unggul terhadap ras lain sehingga menimbulkan pertikaian.

e. Konflik Politik

Konflik Politik merupakan suatu pertikaian yang disebabkan oleh adanya kepentingan untuk memperoleh suatu jabatan, kekuasaan, wewenang ataupun pemerintah. Konflik politik didalam masyarakat terjadi karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat.

f. Konflik Budaya

Konflik budaya merupakan pertikaian yang terjadi dimasyarakat yang disebabkan karena faktor perbedaan kebudayaan.¹²

¹² Rusdiana, Op. Cit., 141-143

4. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

a. Perbedaan Fisik

Perbedaan fisik ini lebih menekankan kepada perbedaan jasmaniah. Misalnya adalah perbedaan rupa, perbedaan warna kulit. Adapun perbedaan material lebih dicirikan dengan kepemilikan harta benda.

b. Perbedaan Pola Kebudayaan

Perbedaan yang terdapat antardaerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama, dan pandangan hidup. Berdasarkan perbedaan pola kebudayaan tersebut, dapat melahirkan dan memperkuat sentiment primordial yang dapat mengarah pada terjadinya konflik antar golongan atau kelompok.

c. Perbedaan Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (*achieved status*) dan adapula status yang diperoleh tanpa diusahakan (*ascribed status*). Status yang dapat diusahakan dapat dicapai melalui pendidikan, orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki status yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang berpendidikan

rendah, sedangkan status tanpa diusahakan adalah status yang diperoleh dari keturunan, seperti kasta dalam agama hindu.

d. Perbedaan Kepentingan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial yang dapat menimbulkan pertentangan antarindividu maupun kelompok.¹³

5. Indikator Konflik

Menurut Taylor dan Hudson yang dikutip oleh A. Rusdiana dalam Manajemen Konflik, ada beberapa indikator yang menggambarkan konflik di Indonesia. Beberapa indikator tersebut diantaranya¹⁴:

a. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan upaya menyampaikan pendapat dan atau menentang suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Demonstrasi dilakukan oleh sebagian orang guna melakukan protes terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan.

b. Kerusuhan

Pada dasarnya kerusuhan mirip dengan demonstrasi, yang membedakan adalah penggunaan kekerasan dalam

¹³ Rusdiana H. A., 2015, *Manajemen Konflik*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 151

¹⁴ Rusdiana, Op. Cit., 144

menyampaikan protes. Kerusuhan sendiri biasanya diikuti dengan pembakaran bangunan, penyiksaan serta penganiayaan.

c. Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata adalah suatu usaha yang digunakan oleh suatu kelompok untuk melemahkan bahkan menghancurkan kelompok lain dengan tujuan untuk memuluskan kepentingan kelompoknya. Serangan bersenjata biasanya diikuti dengan pertumpahan darah, pengerusakan dan pergulatan fisik yang diakibatkan oleh penggunaan senjata oleh penyerang.

d. Kematian

Kematian yang dimaksud disini adalah kematian yang disebabkan oleh demonstrasi, kerusuhan ataupun serangan bersenjata. Kematian yang disebabkan oleh konflik merupakan suatu indikasi bahwa konflik tersebut memiliki intensitas yang tinggi.

6. Konsep Kekerasan

Johan Galtung (dalam Susan 2009: 104) menciptakan tiga dimensi kekerasan yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Kekerasan langsung sering kali terjadi karena pemanfaatan kekuatan sumber (*resource power*). Kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitif, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologism dan kekuasaan renumeratif.

a. Kekerasan Struktural

Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (human needs) merupakan konsep kekerasan struktural (sturktural violence). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya yang berada dilingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh sturktur sosial atau politik sampai tidak adanya untuk mengakses pendidikan secara adil.

b. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (direct violence) dapat dilihat pada kasus pemukulan seorang terhadap orang lainya dan menyebabkan luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung.

c. Kekerasan Budaya

Kekerasan Budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung. Karena sifat budaya bisa

muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Galtung menekankan, makna kekerasan budaya yang ia maksud bukanlah hendak menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya melainkan aspek –aspek dari kebudayaan itu.

Seperti yang dipaparkan Galtung, kekerasan budaya ini bisa menciptakan kekerasan struktural dan langsung yang prosesnya terjadi didalam kehidupan sosial dan politik. Berikut adalah tabel dimensi kekerasan yang dibuat oleh Galtung:

	Kebutuhan Bertahan	Kebutuhan Pada Kondisi yang Positif	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	a. Serangan yang menghancurkan b. Sanksi-sanksi mengerikan	a. Desosialisasi b. Resosialisasi c. Warga Kelas Dua	a. Represi b. Pengusiran
Kekerasan Stuktural	Eksplorasi	Eksplorasi	a. Penetrasi b. Segmentasi	a. Marginalisasi b. Fragmentasi

Tabel 1.01 Model Kekerasan Galtung

7. Tahapan Eskalasi Konflik

Menurut IDEA (2000:48-49), ada empat tahapan yang dilalui oleh konflik, yaitu; diskusi, polarisasi, segregasi, dan destruksi.

Tahap pertama, diskusi. Dalam situasi ini terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak namun masih cukup dekat untuk bekerjasama. Hubungan antara kedua pihak diwarnai dengan kepercayaan dan saling menghargai. Isu-isu yang ditekankan dalam

pertikaian adalah isu substantif dan objektif. Kemungkinan hasilnya diasumsikan mampu memuaskan kedua belah pihak, solusi sama-sama menang. Metode yang dipilih untuk mengelola konflik adalah melalui kerjasama untuk mencapai penyelesaian bersama.

Kedua, polarisasi. Kedua pihak mulai memberikan jarak, menarik diri dan menjauh satu sama lain. Komunikasi mulai tidak langsung dan bergantung pada interpretasi, selanjutnya persepsi mengenai pihak lainnya mengeras menjadi stereotip. Hubungan memburuk menjadi hubungan yang saling menghormati menjadi lebih dingin ketika semua pihak memandang pihak lain sebagai pihak yang tidak penting. Isu-isu yang ditekankan bukan lagi elemen yang obyektif, namun bergeser ke kecemasan psikologis mengenai hubungan itu. Hasilnya bukan lagi kemenangan kedua pihak, namun kompromi untuk memenangkan sebagian dan kehilangan yang lainnya. Metode pengelolaan konflik bergeser dari pembuatan kebijakan bersama menjadi negosiasi kompetitif.

Ketiga, segregasi. Dalam tahap ini, kedua pihak saling menjauh dari pihak lawannya. Komunikasi terbatas pada ancaman. Persepsi menguat menjadi gambaran “kita sebagai yang baik dan mereka sebagai yang jahat”. Hubungan diwarnai ketidakpercayaan dan tidak saling menghargai. Isu yang ditekankan dalam pertikaian ini adalah kepentingan dan nilai utama setiap kelompok. Hasilnya dianggap sebagai perhitungan zero-sum; situasi kalah atau menang

sederhana. Dan metode yang dipilih adalah kompetisi defensif, ketika masing-masing pihak berusaha melindungi kepentingannya sendiri dan berusaha lebih cerdas dari lawannya.

Keempat, destruksi. Ini merupakan tahap permusuhan yang sepenuhnya.

Komunikasi hanya berupa kekerasan langsung atau tanpa hubungan sama sekali. Untuk menjustifikasi kekerasan, persepsi mengenai pihak lain menjadi penjelasan yang memojokkan mengenai pihak lawan sebagai bukan manusia, psikopat atau lainnya. Hubungannya dianggap berada dalam kondisi tanpa harapan. Isu yang ditekankan kini hanyalah keselamatan suatu pihak terhadap agresi pihak lainnya. Kemungkinan hasil yang dipersepsikan adalah sama-sama kalah. Metode yang digunakan untuk mengelola konflik pada tahap ini adalah usaha untuk menghancurkan pihak lawan; suatu keadaan perang.¹⁵

8. Resolusi Konflik

Menurut Sarwono (1999) yang dikutip oleh A. Rusdiana dalam Manajemen Konflik mengatakan metode resolusi merupakan suatu proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik antara lain kontak hubungan langsung; komunikasi : bargaining : tawar menawar, mediasi : mediator, win-lose menjadi win-win; arbitrase : pihak

¹⁵ Anstey, Mark, DKK.2000. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar. AMEPRO

ketiga tidak hanya menawarkan, jika perlu memaksa; konsiliasi : mundur peredaan ketegangan. Secara terperinci beberapa cara penyelesaian berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya.

a. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari kata *Consliation* yang memiliki arti perdamaian. Konsiliasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, konsiliasi ini mempertemukan kedua belah pihak yang bertika untuk menemukan kesepakatan damai oleh keduanya. Konsiliasi ini berjalan atas keinginan salah satu pihak sebagai pemrakarsa atau keduanya.

b. Mediasi

Mediasi berasal dari kata *Mediation* yang memiliki arti perantara atau media. Mediasi dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara yang menjadi penghubung kedua belah pihak yang bertikai.

Perantara bertugas menampung dan menyampaikan keluhan masing masing pihak, kedua belah pihak yang memutuskan penyelesaian dalam pertikaian sehingga perantara tidak memiliki wewenang untuk memutus dan menyelesaikan pertikaian.

c. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata *Arbitration*, sedangkan yang menentukan keputusan arbiter. Penyelesai konflik secara arbitrasi adalah penyelesai konflik yang menggunakan lembaga yang dipimpin seseorang yang berperan untuk memutuskan.

d. Paksaan

Paksaan atau *Coercion* dijadikan alternatif dalam penyelesai konflik apabila terjadi ketidakseimbangan diantara kedua belah pihak yang bertikai. Ketidakseimbangan dapat mengakibatkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik. Padahal konflik tersebut harus segera diselesaikan karena mengakibatkan dampak yang negatif.

Dalam penyelesai konflik tersebut pihak yang kuat lebih berperan dalam menyelesaikan dan memutuskan konflik dengan cara melakukan paksaan psikologis maupun secara fisik.

e. *Detente*

Detente memiliki arti mengendorkan atau mengurangi ketegangan. Dalam menyelesaikan suatu konflik, *detente* lebih bersifat persuasif terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Ketegang yang ditimbulkan karena konflik dapat dikurang melalui cara-cara diplomatis yang dapat memberikan kedua

belah pihak yang bertikai mempersiapkan diri untuk menyelesaikan konflik secara damai.¹⁶

9. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji berbagai jurnal, literatur, media belum ada penelitian sebelumnya mengenai variabel dalam penelitian ini, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini, berikut adalah temuan penelitian sebelumnya:

a. Humaedi (2014)

Humaedi menemukan bahwa kegagalan akulturasi budaya antara suku Balinuraga dengan Lampung yang dimulai prosesnya dari ketiadaan ruang sosial bersama diyakini sebagai akar masalah konflik Lampung. Sayangnya, masalah ini seringkali tidak dilihat para pemangku kepentingan dan lembaga kemanusiaan dalam proses penyelesaian konflik Lampung. Penanganan yang ada hanya berhubungan dengan kegiatan di masa tanggap darurat, yaitu pemberian bantuan makanan, akomodasi, dan jaminan keamanan. Para penangan bencana kemudian pergi meninggalkan masyarakat

¹⁶ Rusdiana, Op. Cit., 158-160

tanpa ada program lanjutan yang bisa memupus akar persoalan konflik, antara Balinuraga dengan suku Lampung.¹⁷

b. Afero dan Hartoyo (2013)

Afero dan Hartoyo menemukan bahwa peran pemerintah terhadap resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai, untuk itu diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif.¹⁸

c. Anisa Utami (2014)

Anisa utami mengemukakan bahwa pemerintah berhasil mendamaikan kedua etnis tersebut dibuktikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari antar desa yang sudah normal dan menunjukkan adanya perubahan-perubahan sikap baik etnis Bali maupun etnis Lampung. Pasca konflik kekerasan tersebut hubungan antar etnis Bali, etnis Lampung dan etnis etnis lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan membentuk forum-forum keagamaan seperti FKUB (Forum Kerukunan antar Umat

¹⁷ Humaedi, 2014, "*Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung*". Portal Garuda, Vol 21, No 02 (2014): Volume 21 Nomor 02 Juli - Desember 2014, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=320968>, 20 Februari 2016

¹⁸ Afero, Deni & Hartoyo. 2013, "*Keharmonisan Hubungan Antara Etnis Bali Dengan Etnis Lampung (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)*". Fisip Universitas Lampung, <http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/208/submission/original/208-631-1-SM.pdf>, 20 Februari 2016

Beragama) yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan antar etnis-etnis yang berbeda di Kabupaten Lampung Selatan.¹⁹

d. Kurniawan & Syani (2013)

Kejadian konflik pada bulan Oktober 2012 yang telah lewat merupakan pukulan keras terhadap warga Balinuraga untuk merubah etikanya dalam menjalani kehidupan bersama masyarakat luas. Perubahan etika warga Balinuraga ini merupakan dorongan dari individu warga tersebut, dikarenakan keinginan untuk bisa hidup tenang, damai dan bisa diterima kembali oleh masyarakat umum merupakan keinginan dan kemenangan warga Balinuraga.

Dari model perjanjian strategi menang-menang (win-win strategy) ini diharapkan rasa bangga hati dan tidak merasa direndahkan akan menjadi sebuah solusi yang tepat untuk menghindari sebuah konflik laten susulan dikemudian hari. Sikap saling terbuka dan memaafkan seluruh kesalahan yang telah kedua belah pihak lakukan adalah langkah utama dalam menjalani kehidupan baru kearah yang lebih baik dan harmonis.²⁰

¹⁹ Utami, Anisa., 2014, "*Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan)*". Fisip Universitas Diponegoro, <http://fisip.undip.ac.id>, 20 Februari 2016

²⁰ Kurniawan, Dedi & Syani, Abdul. 2013. "*Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*". Fisip Universitas Lampung, 20 Februari 2016

F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti peran pemerintah dalam upaya untuk melakukan penanganan terhadap konflik horisontal yang terjadi. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti memandang bahwa seharusnya pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam menangani konflik sedini mungkin sehingga dapat menghindari dampak yang lebih buruk ditenga masyarakat.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik adalah suatu pertikaian yang terjadi antara dua orang dimana masing-masing memiliki kepetiangan terhadap pihak lain sehingga menimbulkan suatu perbedaan pendapat dan upaya untuk menyingkirkan bahkan menghancurkan yang lainnya.

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya untuk meredam dan menyelesaikan suatu petikaian yang telah berlangsung lama dan diharapkan dapat berdamai dengan tanpa kekerasan.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah suatu struktur yang memiliki peran pemerintahan dibawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah

menjalankan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat atas asas-asas otonomi daerah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kealitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²¹

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan unit pemerintahan di Desa Balinuraga, Desa Agom, pada bulan Januari hingga Februari 2016. Pada Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan dari Peran Pemerintah Lampung Selatan dalam upaya Resolusi Konflik di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Organisasi

²¹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: AFABETA, hlm. 8

Dalam hal ini yang termasuk kedalam organisasi adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kecamatan Way Panji, Pemerintah Desa Bali Nuraga, Kepala Dinas Pramong Praja Kabupaten Lampung Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Selatan.

b. Masyarakat

Masyarakat objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengancara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam hal ini pedoman wawancara tidak harus ada.²²

Narasumber yang diwawancara dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Desa Balinuraga dan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan. Fokus wawancara kepada kelompok diatas dengan

²² Id. At 133

pertimbangan bahwa mengetahui dengan mendalam terkait dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini beberapa narasumber diantaranya:

- I. Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan SKPD yang mengurus masalah kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat di lingkup Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Bidang Politik dan Masyarakat Badan Kesbangpol Linmas Ismet Alwi.
- II. Narasumber dari Masyarakat Desa Balinuraga adalah Pangir, dalam hal ini Pangir dipilih karena domisili di dekat pintu masuk desa sehingga kerusakan pada rumahnya parah.
- III. Narasumber dari Masyarakat Desa Agom adalah Zulkarnain, dalam hal ini Zulkarnain adalah tokoh masyarakat Desa Agom

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti²³. Data sekunder ini diharapkan sebagai penunjang dalam menganalisa permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Dokumentasi disini adalah Foto.

²³ Nasution, 2003, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 143.

5. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data di lapangan. Data primer misalnya adalah data mengenai korban konflik di Desa Balinuraga, maka data yang didapat adalah datang yang langsung bersumber dari korban korban tersebut.

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Proses perjanjian damai	Kepala Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Wawancara Mendalam (<i>in dept interview</i>)
Proses pemeliharaan perdamaian	Kepala Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Wawancara Mendalam (<i>in dept interview</i>)
Aplikasi masyarakat terhadap perjanjian damai dalam kehidupan masyarakat	Tokoh masyarakat.	Wawancara mendalam (<i>in dept interview</i>)

Tabel 1.03 Data Primer Penelitian

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Peneliti meneliti mengenai konflik di Desa Balinuraga dan data yang diperoleh dari Pemangku Kepentingan dalam rekonsiliasi konflik tersebut maka data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder misalnya: surat kabar, buku, jurnal dan hasil penelitian serta majalah.

Data sekunder kemudian dikategorikan menjadi dua:

1. Internal Data yaitu tersedia tertulis pada sumber data sekunder misalnya data yang diperoleh dari institusi pemerintahan Kabupaten Lapung Selatan..
2. Eksternal Data yaitu data yang diperoleh dari sumber luar misalnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Berita dan Informasi Daring (Online).²⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan memberi kode atau tanda dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara cermat dan teliti.²⁵

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptif research) adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.²⁶

²⁴ *Iid.* at . 128

²⁵ Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi; Pemerintahan Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 249

²⁶ Hamdi, Asep Saepul & Bahruddin, E., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Aplikasi Pendidikan*, Yogyakarta: deepublish, Hlm. 5

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara:

1. Meringkas data

Ringkasan diartikan sebagai penyajian singkat dari suatu karangan asli tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proposional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat itu (Keraf 1984: 262). Dengan kata lain, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat.

Gorys Keraf mengemukakan bahwa membuat ringkasan dapat berguna untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Penulis ringkasan dapat memahami dan mengetahui dengan mudah isi karangan aslinya, baik dalam penyusunan karangan, cara penyampaian gagasannya dalam bahasa dan susunan yang baik, cara pemecahan suatu masalah, dan lain sebagainya. Beberapa bentuk ringkasan di antaranya dapat berupa abstrak, sinopsis, dan simpulan.²⁷

2. Menelaah Data

Peneliti akan menelaah data yang tersedia dalam hasil pengumpulan data yang melingkupi hasil wawancara dan

²⁷ Keraf, Gorys. 1984. "*Komposisi*". Flores: Penerbit Nusa Indah

pengamatan. Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif adalah satu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri²⁸ sedangkan reflektif adalah menerangkan objek penbelitian yang sedang diteliti secara lebih mendalam.

3. Mereduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²⁹

4. Menafsirkan Data

Menafsirkan data ialah memaknai atau mengartikan data yang telah didapat untuk menemukan korelasi antara data yang didapat dengan teori yang ada.

²⁸ Vardiansyah, Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks . Hlm.9

²⁹ Miles, MB dan AM Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE. Beverly Hills.

I. Pedoman

Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari 4 (empat) BAB yang meliputi:

1. BAB I Pendahuluan yaitu terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat dilaksanakannya penelitian ini, Teori dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini.
2. BAB II, berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Lampung Selatan termasuk Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan, Masyarakat Lampung dan Masyarakat Bali di Kabupaten Lampung Selatan.
3. BAB III, Pembahasan mengenai Faktor Internal dan Eksternal Konflik serta peranan pemerintah dalam menangani dan menjembatani perdamaian konflik di Kabupaten Lampung Selatan.
4. BAB IV, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh bab yang telah dikemukakan serta saran yang diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait.